

PROYEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5) SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 BANGUNTAPAN

PANCASILA STUDENT PROFILE STRENGTHENING PROJECT (P5) AS IMPLEMENTATION OF CHARACTER EDUCATION POLICY AT STATE SENIOR HIGH SCHOOL 2 BANGUNTAPAN

Oleh: Galang Riko Wikan Wijaya, Universitas Negeri Yogyakarta
galangriko.2020@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan karakter melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMAN 2 Banguntapan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan implementasi P5 berjalan cukup baik ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berlangsung efektif, meskipun informasi teknis masih sering berubah. Sumber daya sekolah tergolong memadai, namun keterbatasan waktu menjadi kendala utama. Keberhasilan implementasi lebih dipengaruhi oleh komitmen guru dibandingkan kelengkapan fasilitas. Faktor penghambat lainnya meliputi kebutuhan bahan proyek dan menurunnya antusiasme siswa.

Kata kunci: Profil Pelajar Pancasila, Pendidikan Berbasis Proyek, implementasi kebijakan, George C. Edward III, pendidikan karakter

Abstact

This study aims to describe the implementation of character education policy through the Project for Strengthening the Pancasila Student Profile (P5) at SMAN 2 Banguntapan and to identify its supporting and inhibiting factors. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and document analysis. Data were analyzed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldana, while data validity was ensured through technique and source triangulation. The findings indicate that the implementation of P5 has generally been carried out well in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Communication was effective, although technical information frequently changed. School resources were considered adequate; however, time constraints emerged as the main obstacle. The success of implementation was influenced more by teachers' commitment than by the availability of facilities. Other inhibiting factors included the need for specific project materials and declining student enthusiasm.

Keywords: Pancasila Student Profile, Project-Based Learning, policy implementation, George C. Edwards III, character education

PENDAHULUAN

Pertumbuhan seorang anak pendidikan menjadi sebuah tuntutan, maksudnya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatan sebagai anggota masyarakat dan sebagai manusia, pendidikan menuntut kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak (Efendy, 2023). Selain itu, pendidikan juga akan membimbing individu menuju kesejahteraan, penuh iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan membentuk karakter yang baik, keterampilan yang tinggi, kemampuan sosial yang baik, kecerdasan, dan kemandirian.

Bangsa yang berkarakter kuatlah yang bisa disebut bangsa yang besar yang tumbuh dan berkembang dari pendidikan yang menyenangkan dan lingkungan yang menerapkan nilai-nilai baik dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampingan dengan kompetensi yang tinggi (Hendarman et al., 2018). Pendidikan karakter saat ini menjadi semakin krusial sehingga dengan menanamkan nilai-nilai luhur seperti integritas, toleransi, dan gotong-royong sejak dini. Jati diri bangsa dapat menjadi kokoh jika memiliki karakter yang kuat dan kompetensi yang tinggi, maka diharapkan anak Indonesia memiliki akhlak yang mulia di samping cerdas secara

intelektual (Rahmalia et al, 2023). Untuk menjawab berbagai tantangan di era saat ini perlu peningkatan kerja sama dan daya saing bangsa.

Permasalahan yang dihadapi saat ini menjadi kompleks karena efek globalisasi yang menjadi tantangan dalam pendidikan karakter (Zein & Siregar, 2024). Hal ini ditandai dengan meningkatnya kasus kenakalan remaja yang mencerminkan degradasi moral dan karakter generasi muda. Data pada tahun 2013 menunjukkan terdapat 6.325 kasus kenakalan remaja di Indonesia. Kemudian pada tahun 2014, angka kasus kenakalan remaja mencapai jumlah 7.007 kasus. Sedangkan pada tahun 2015, jumlahnya mencapai 7.762 kasus. Hal tersebut, menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terjadi kenaikan 10,7% angka kenakalan remaja di Indonesia. Jumlah kenakalan remaja akibat degradasi moral mencapai 10.549 kasus menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 (Mintawati et al, 2023). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat pada tahun 2020 terjadi kasus kenakalan remaja sebanyak 247.218 kasus. Pada tahun 2021 kasus kenakalan remaja meningkat menjadi sejumlah 257.743 (Anggraini et al, 2025).

Data-data tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter kini menjadi

perhatian bersama karena saat ini masyarakat Indonesia menghadapi krisis moral dan karakter yang mengkhawatirkan. Krisis ini terlihat dalam meningkatnya tindak kejahatan seperti pelecehan seksual, kekerasan kepada remaja dan anak, tawuran pelajar, maraknya geng motor dan aksi begal, serta hilangnya sopan santun terhadap orang lain atau orang tuanya sendiri, bahkan hingga berujung pada kasus pembunuhan dan tindakan kekerasan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Fenomena ini telah merusak reputasi pelajar dan institusi pendidikan, karena banyak yang percaya bahwa kondisi ini bermula dari lingkungan pendidikan itu sendiri. Meskipun pada faktanya terdapat berbagai pengaruh dari hal lain, seperti teman sebaya, masyarakat sekitar, atau bahkan dari orang tua. Bukti nyata turunnya moralitas seorang siswa juga dapat di lihat di sekolah, antara lain adalah siswa yang berani menyontek, bolos sekolah, melanggar peraturan sekolah, dan melawan guru. Beberapa hal tersebut dapat dijumpai di semua jenjang pendidikan baik dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kebiasaan menyontek adalah bukti nyata turunnya moralitas pelajar, yang di mana jika terbawa hingga dewasa bisa jadi memicu orang tersebut untuk melakukan tindak kejahatan korupsi dan sebagainya.

Maraknya kasus-kasus tersebut mencerminkan bahwa sebagian remaja saat ini mengalami krisis dalam pengendalian diri, moralitas, serta nilai-nilai sosial. Dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah kasus tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan. Sekolah memiliki tanggung jawab sebagai lembaga pendidikan, selain mentransfer ilmu pengetahuan sekolah² juga menanamkan nilai-nilai luhur seperti integritas, tanggung jawab, empati, dan gotong royong. Pendidikan yang berkelanjutan dan sistematis sangat penting untuk pembinaan karakter siswa melalui kebijakan pendidikan karakter, agar peserta didik kokoh secara moral dan sosial dalam kepribadiannya serta terhindar pengaruh negatif dari lingkungan.

Kesadaran, kemauan, komponen kesadaran, dan tindakan pelaksanaan nilai moral dan karakter merupakan sebagian wujud penanaman nilai karakter di sekolah. . Pendidikan karakter dan moral sangat dibutuhkan saat ini melihat permasalahan yang ada. Untuk membentuk moral dan karakter pada siswa, guru sangat diperlukan.. Pelaksanaan pendidikan karakter tidak bisa berdiri sendiri, untuk memasukkan nilai-nilai moral dan karakter budaya Indonesia harus juga terintegrasi dengan mata pelajaran yang ada. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk

melakukan penanaman, pengembangan, dan pembentukan karakter yang mulia pada siswa. Supaya tidak terjerumus dalam perilaku negatif yang dapat merusak moral, karakter yang kuat berperan sebagai filter bagi anak-anak..

Perilaku manusia yang baik, bertanggung jawab, jujur, kerja keras, serta paham hak dan kewajiban manusia merupakan hasil dari dilakukannya pendidikan karakter menurut Thomas Lickona, dimana melalui pendidikan budi pekerti untuk membentuk kepribadian seseorang (Suwartini, 2018). Sebagai bagian integral dari proses pendidikan dan sistem pendidikan, penanaman nilai karakter dalam pendidikan bukanlah hal yang baru (Sabir et al, 2024). Nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan merupakan prinsip-prinsip yang esensial dalam kehidupan. Khususnya, sikap hormat dan tanggung jawab merupakan nilai karakter utama yang bersifat universal, membawa manfaat bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan (Fathurrahman, 2020).

Salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat karakter pada siswa yang sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 adalah dengan diterapkannya kebijakan profil pelajar pancasila. Pelajar Pancasila adalah bentuk pelajar sepanjang hayat dari pelajar Indonesia yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan memiliki kompetensi global, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, serta bernalar kritis dan kreatif (Hendarman, et al, 2018). Sejak tahun 2021, P5 mulai diimplementasikan di berbagai sekolah di seluruh Indonesia sebagai bagian kurikulum merdeka (Imania & Suprayitno, 2024). Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan mengidentifikasi faktor organisasi sekolah, khususnya komitmen guru, komunikasi internal, dan dukungan kepemimpinan sekolah, sebagai determinan utama keberhasilan pelaksanaan program. Berbagai penelitian dan laporan implementasi menunjukkan bahwa P5 telah diterapkan mulai dari jenjang dasar hingga menengah di berbagai provinsi, salah satunya di SMAN 2 Banguntapan yang berada di Bantul, DIY (Pramesti et al., 2024).

Terdapat program khusus untuk pendidikan karakter di SMAN 2 Banguntapan yang dimaksudkan untuk memperkuat upaya dalam mencapai kompetensi dan karakter siswa melalui pendekatan berbasis proyek, yaitu dengan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Melalui penerapan P5, SMAN 2 Banguntapan berupaya menciptakan lingkungan belajar yang fokus pada proses pembentukan karakter siswa disamping hasil secara akademik. Program tersebut menjadikan siswa mempunyai kesempatan untuk lebih mengenal diri, membangun empati, berpikir kritis, serta bertindak secara bertanggung jawab dalam kehidupan sosial yang dapat membentuk moral para siswa. Siswa diharapkan menjadi manusia yang lebih baik dan menjauhi perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja dengan diimplementasikannya pendidikan karakter yang mempunyai peran penting. Dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui pendidikan karakter di SMAN 2 Banguntapan melalui penelitian yang berjudul “Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Sebagai Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter di SMAN 2 Banguntapan”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif yang dalam pelaksanaannya bersifat deskriptif dan analitis atau disebut dengan metode penelitian naturalistik digunakan dalam penelitian ini (Armia, 2022). Deskriptif berarti menggambarkan dan menyebutkan kejadian, fenomena, atau keadaan sosial yang sedang dianalisis. Sementara itu, analitis merujuk pada pemberian makna, penafsiran, serta perbandingan antara data yang diperoleh dari penelitian tersebut (Waruwu, 2023)

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 2 Banguntapan yang beralamat di Jl. Imogiri Timur, Glondongan, Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan SMAN 2 Banguntapan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa sekolah ini merupakan salah satu Sekolah Penggerak yang menjadi bagian dari implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka, termasuk pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Sebagai Sekolah Penggerak, SMAN 2 Banguntapan memiliki peran strategis dalam mengadopsi dan mengimplementasikan berbagai inovasi kebijakan pendidikan yang

berorientasi pada penguatan karakter peserta didik. Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei-Agustus 2025.

Subjek Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Pemilihan narasumber didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pelaksanaan program, serta mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Informan penelitian terdiri atas unsur pimpinan sekolah, koordinator P5, guru fasilitator, dan peserta didik. Pengumpulan data dilakukan hingga mencapai saturasi data, yaitu ketika data yang diperoleh dari informan telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak lagi menghasilkan informasi atau temuan baru yang signifikan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi lingkungan sekolah, kegiatan siswa, civitas akademik, karyawan, dan terjadinya implementasi pendidikan karakter yang ada di sekolah untuk melakukan observasi. Peneliti

dilakukan dengan mencatat dan mengamati secara sistematis kejadian yang sebenarnya di SMAN 2 Banguntapan.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui percakapan baik lisan maupun tidak dengan tujuan atau maksud tertentu. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini dimulai dengan membuat pedoman wawancara yang kemudian dikembangkan lebih rinci sesuai kebutuhan penelitian guna mendapatkan informasi terkait dengan data yang ingin diperoleh peneliti.

3. Studi Dokumen

Untuk memperoleh data sekunder agar mendapatkan hasil observasi, wawancara, dan memberikan gambaran tentang kebijakan, perencanaan, serta implementasi pendidikan karakter di SMAN 2 Banguntapan dilakukan melalui studi terhadap dokumen.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai oleh peneliti adalah teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Model yang digunakan ini merupakan pendekatan analisis data kualitatif yang bersifat sistematis, berkelanjutan, dan

saling berkaitan antar komponen. Proses analisis dilakukan sejak awal pengumpulan data dan terus berlangsung selama proses penelitian hingga tahap pelaporan. Analisis tersebut terbagi menjadi tiga bagian utama, diantaranya adalah kondensasi data, penyaian data, serta penarikan dan juga verifikasi kesimpulan.

Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data dari penelitian, maka peneliti memakai teknik yang bernama teknik triangulasi yang merupakan sebuah teknik yang memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan hal lain atau objek yang ada di luar data itu sendiri untuk perbandingan terhadap data yang telah dikumpulkan. Teknik triangulasi yang dipakai untuk melakukan penelitian ini ada dua jenis, yaitu triangulasi sumber dan teknik.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Sintesis Penelitian Terdahulu

Peneliti	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Research Gap
Santoso, D.K.G (2024)	Implementasi kebijakan pendidikan karakter untuk mengurangi perilaku klitih di SMA Budi	Implementasi pendidikan karakter berjalan melalui tahap interpretasi, organisasi,	Penelitian berfokus pada implikasi pendidikan karakter terhadap perilaku klitih, belum

Peneliti	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Research Gap
	Luhur Yogyakarta	dan aplikasi. Program berkontribusi menurunkan perilaku klitih, meskipun masih terkendala kualitas SDM, sarana, serta keterlibatan orang tua.	mengkaji implementasi P5 sebagai kebijakan Kurikulum Merdeka dan belum menganalisis faktor organisasi sekolah secara spesifik.
Tasnur & Kumalasari (2020)	Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran di SMA Internasional Budi Mulia Dua Yogyakarta	Pendidikan karakter diterapkan melalui pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek, didukung relasi personal guru-siswa dan lingkungan sekolah yang partisipatif.	Penelitian berfokus pada integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran, bukan pada implementasi kebijakan P5 di level institusional sekolah.

Yudo Febriantoro & Syunu Trihantoyo (2019)	Implementasi pendidikan karakter melalui Program Adiwiyata di SMA Negeri 1 Mejayan	Program Adiwiyata efektif menanamkan karakter melalui keterlibatan siswa dalam aktivitas nyata dan pembentukan budaya sekolah.	Penelitian menitikberatkan pada program Adiwiyata sebagai media pendidikan karakter, belum membahas implementasi kebijakan P5 dalam kerangka Kurikulum Merdeka.
Gun Yuliono (2023)	Implementasi pendidikan karakter religius dan toleransi melalui budaya sekolah	Budaya sekolah yang inklusif berhasil membentuk karakter religius dan toleransi melalui kegiatan sekolah yang terstruktur.	Fokus penelitian pada budaya sekolah dan karakter religius, belum menganalisis implementasi kebijakan P5 menggunakan perspektif kebijakan publik.
Eva Fitriana (2024)	Implementasi kebijakan pendidikan karakter religius di MAN 5 Sleman	Keberhasilan implementasi dipengaruhi regulasi yang jelas, kepemimpinan guru, fasilitas memadai,	Penelitian berfokus pada karakter religius dan belum mengkaji dimensi implementasi P5 secara komprehensif

		serta kolaborasi sekolah dan orang tua.	if melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Penelitian Ini	Implementasi kebijakan pendidikan karakter melalui P5 di SMAN 2 Banguntapan	Menganalisis implementasi P5 berdasarkan model Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi) serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi.	Penelitian ini mengisi kekosongan kajian terkait implementasi kebijakan P5 dengan menekankan faktor organisasi internal sekolah sebagai determinan utama keberhasilan program.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

SMAN 2 Banguntapan telah melaksanakan P5 sebagai strategi implementasi kebijakan pendidikan karakter melalui kegiatan berbasis proyek yang kontekstual, kolaboratif, dan reflektif. Tokoh pendidikan, Edward III, menyebutkan terdapat empat faktor yang sangat berpengaruh terhadap sebuah implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya,

disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Definisi lain dari implementasi kebijakan adalah kegiatan oleh orang baik individu maupun kelompok yang bertujuan melaksanakan sebuah program ataupun kebijakan yang sebelumnya telah dirumuskan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, keputusan, maupun instruksi, agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai (Wahab, 2008).

Sebagai bentuk konkret implementasi kebijakan pendidikan karakter yang dimaksud dalam Kurikulum Merdeka, Proyek Penguatan Profil pelajar Pancasila (P5) hadir untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik melalui kegiatan berbasis proyek. Melalui P5, seluruh dimensi dalam profil pelajar pancasila dikembangkan secara terintegrasi sehingga peserta didik diharapkan bisa berkembang sebagai individu yang unggul secara intelektual maupun memiliki karakter yang kuat sehingga mampu beradaptasi dengan rintangan zaman yang terus berkembang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menghasilkan bahwa komunikasi siswa, guru pendamping, serta kepala sekolah berlangsung efektif melalui rapat koordinasi, pengarahan rutin, dan pemanfaatan media digital. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Edward III bahwa komunikasi harus jelas,

konsisten, dan disampaikan melalui saluran yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi kebijakan. Selain itu, komunikasi yang terbina mendukung tujuan pendidikan karakter sebagaimana dikemukakan oleh Kemendiknas, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, jujur, kreatif, dan bertanggung jawab. Kejelasan komunikasi menjadi landasan keberhasilan pembentukan budaya sekolah yang mendukung karakter peserta didik. Temuan lapangan membuktikan kesesuaian komunikasi pelaksanaan P5 dengan prinsip Kurikulum Merdeka, yang menekankan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan pembelajaran. Komunikasi yang baik ini membantu memperkuat budaya sekolah dalam pembinaan karakter karena setiap guru memiliki peran yang sama dalam membimbing siswa menjalankan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila. Namun demikian, beberapa guru menyatakan bahwa beberapa informasi teknis masih sering disampaikan mendadak sehingga harus menyesuaikan kegiatan belajar mengajar reguler. Hal tersebut menunjukkan meskipun komunikasi terlaksana secara efektif, akan tetapi perlu ditingkatkan terkait keteraturan *timeline* dan kesinambungan informasi.

Meskipun komunikasi dalam implementasi P5 di SMAN 2 Banguntapan

telah berjalan cukup efektif melalui rapat koordinasi, *workshop*, dan media komunikasi digital, perubahan informasi teknis yang terjadi secara mendadak menunjukkan bahwa proses komunikasi belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini dapat dipahami karena P5 merupakan kebijakan yang relatif baru dalam implementasi Kurikulum Merdeka, sehingga petunjuk teknis dan mekanisme pelaksanaannya masih terus mengalami penyesuaian. Selain itu, pola komunikasi yang bersifat *top-down* dari tingkat pemerintah atau dinas pendidikan mengharuskan sekolah untuk cepat mengadaptasi perubahan kebijakan yang terkadang disampaikan dalam waktu yang terbatas. Kompleksitas koordinasi antar aktor sekolah, mulai dari pimpinan, koordinator P5, guru fasilitator, hingga peserta didik, juga berkontribusi terhadap munculnya perubahan informasi teknis di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh intensitas penyampaian informasi, tetapi juga oleh stabilitas, konsistensi, dan kejelasan pesan yang diterima oleh seluruh pelaksana.

Menurut Edward III, fokus utama dalam implementasi kebijakan adalah fasilitas, sumber daya manusia, waktu, serta pendanaan. Temuan penelitian menunjukkan

bahwa SMAN 2 Banguntapan memiliki tenaga pendidik kompeten, fasilitas sekolah memadai, dan dukungan pendanaan BOS Kinerja yang memungkinkan pelaksanaan proyek secara optimal. Beban kerja guru pendamping di sisi lain cukup tinggi karena harus membagi waktu antara pembelajaran reguler dan kegiatan proyek. Observasi mengonfirmasi bahwa pada momen-momen tertentu jadwal proyek berbenturan dengan agenda sekolah lain seperti penilaian tengah semester. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya waktu masih menjadi tantangan yang perlu dikelola lebih strategis. Secara teoritis, kondisi ini mendukung pandangan Edward III bahwa implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya agar kegiatan tidak hanya berhenti pada arahan, tetapi terwujud dalam tindakan nyata.

Peneliti berhasil menemukan data yang menunjukkan bahwa guru pendamping, kepala sekolah, serta siswa mempunyai disposisi positif dalam melaksanakan P5. Kepala sekolah memberikan motivasi dan memfasilitasi kebutuhan teknis guru sehingga mendorong pelaksana bekerja dengan sungguh-sungguh. Guru pendamping juga menunjukkan sikap antusias dan berupaya kreatif dalam merancang proyek agar sesuai konteks kehidupan siswa. Observasi selama kegiatan proyek

menunjukkan bahwa siswa menunjukkan keterlibatan aktif, bekerja kolaboratif, bertukar ide, serta menunjukkan kreativitas dalam menyelesaikan proyek hingga panen karya. Hal ini membuktikan sikap penerimaan yang baik terhadap pelaksanaan P5.

Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi implementasi P5 di SMAN 2 Banguntapan sudah tersusun secara baik dengan adanya dokumen organisasi pelaksana, pembagian tugas guru pendamping, dan prosedur evaluasi program. Observasi juga menunjukkan adanya rapat monitoring dan evaluasi setiap tahap proyek. Struktur birokrasi yang sistematis mencerminkan bahwa sekolah telah menerapkan SOP dan mekanisme kerja yang sesuai pedoman Kurikulum Merdeka, sehingga pelaksanaan P5 memiliki alur manajerial yang terarah. Meski demikian, penyesuaian teknis tetap diperlukan karena padatnya agenda sekolah terutama bidang akademik formal. Ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi sekolah sudah adaptif, namun masih harus meningkatkan integrasi agenda kurikulum reguler dan proyek agar tidak saling membebani.

Dalam proses pelaksanaan P5, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan P5 dilakukan melalui

penyusunan struktur organisasi pelaksana, perancangan modul proyek, penyusunan jadwal, serta pembagian tugas guru pendamping. Studi dokumen memperlihatkan adanya dokumen resmi seperti modul proyek, susunan panitia, dan dokumen evaluasi kegiatan yang menjadi pedoman kerja pelaksana. Observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek melibatkan siswa secara aktif dalam kelompok, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan ide, penyelesaian proyek, hingga publikasi karya. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Wawancara dengan guru pendamping memperlihatkan bahwa siswa dilatih untuk mengelola waktu, berkomunikasi, bekerja sama, serta memecahkan masalah secara mandiri. Temuan lapangan ini selaras dengan teori pembelajaran berbasis proyek yang menegaskan bahwa proyek memberikan pengalaman langsung untuk mengembangkan nilai dan kompetensi karakter. Selain itu, implementasi pelaksanaan proyek mencerminkan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila, khususnya gotong royong, kreativitas, dan kemandirian, sebagaimana menjadi orientasi utama P5. Pelaksanaan ini menjadi bukti bahwa P5 bukan hanya instruksi administratif, tetapi telah menjadi transformasi budaya belajar,

sebagaimana ditekankan dalam teori pendidikan karakter bahwa pembentukan nilai harus melalui proses pengalaman yang bermakna, bukan ceramah moral yang bersifat verbal.

Dalam monitoring dan evaluasi, hasil observasi menunjukkan bahwa proses monitoring dilakukan melalui rapat internal setelah setiap fase proyek, sementara studi dokumen menunjukkan adanya instrumen penilaian yang membagi penilaian menjadi penilaian proses dan penilaian produk. Wawancara dengan koordinator P5 memperlihatkan bahwa evaluasi dilakukan dengan reflektif untuk memaksimalkan kualitas pelaksanaan tahap berikutnya. Edward III yang menyatakan bahwa elemen penting dalam implementasi kebijakan adalah mekanisme pengawasan dan kontrol agar pelaksana tidak menyimpang dari tujuan awal kebijakan. Selain itu, sistem evaluasi autentik ini juga menggambarkan prinsip penilaian dalam Kurikulum Merdeka, yaitu menilai proses perkembangan kompetensi bukan hanya hasil akhir. Dengan monitoring dan evaluasi rutin, proses pelaksanaan P5 menjadi komprehensif, adaptif, dan berorientasi peningkatan berkelanjutan.

Panen karya adalah puncak pelaksanaan P5 yang memperlihatkan hasil karya siswa kepada warga sekolah. Observasi

memperlihatkan bahwa kegiatan ini berjalan meriah dan melibatkan seluruh warga sekolah. Siswa terlihat antusias mempresentasikan hasil proyek di depan audiens, menunjukkan rasa percaya diri yang berkembang dari proses panjang pembelajaran. Kegiatan panen karya merupakan bentuk realisasi dari tujuan Program Profil Pelajar Pancasila, yaitu membawa siswa memiliki kemampuan reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Selain itu, kegiatan ini mencerminkan pendekatan pendidikan karakter berbasis pengalaman yang ditegaskan oleh Lickona mengenai pentingnya pengalaman moral nyata dalam proses tumbuhnya karakter. Dengan demikian, panen karya bukan sekadar penutup kegiatan, tetapi menjadi arena evaluatif, apresiatif, dan transformasional yang berdampak pada pembentukan karakter siswa.

Pelaksanaan Program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMAN 2 Banguntapan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan dan menentukan efektivitas implementasinya. Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen, ditemukan bahwa keberhasilan P5 ditopang oleh dukungan kuat dari komitmen guru pendamping, kepala sekolah, serta

antusiasme siswa dalam menjalankan kegiatan proyek. Kepala sekolah menunjukkan dukungan penuh melalui penyediaan fasilitas, penguatan motivasi, dan koordinasi internal yang intensif. Guru pendamping berperan aktif sebagai fasilitator pembelajaran berbasis proyek, bukan hanya sebagai pengajar materi akademik, sehingga proses pembelajaran berlangsung konstruktif dan kolaboratif. Sementara itu, siswa menunjukkan keterlibatan tinggi dalam menyusun ide, mengembangkan karya, dan mempresentasikan hasil proyek pada kegiatan panen karya. Temuan tersebut juga memperkuat bahwa keberhasilan penanaman karakter hanya dapat dicapai jika pelaksana memiliki keteladanan moral dan kesediaan penuh untuk menjalankan proses pembiasaan nilai.

Keberhasilan pelaksanaan P5 juga didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang terjalin efektif melalui rapat dinas, *workshop*, serta pemanfaatan media digital seperti grup *WhatsApp*. Observasi menunjukkan bahwa komunikasi ini membantu pelaksana memahami tujuan, jadwal, dan pembagian tugas secara jelas. Selain itu, ketersediaan sumber daya pendukung seperti sarana fisik, ruang kegiatan, perangkat multimedia, serta dukungan pendanaan melalui BOS Kinerja

dan komite sekolah menjadi faktor yang memperlancar pelaksanaan. Struktur birokrasi pelaksana P5 juga tertata dengan baik melalui pembagian tugas yang jelas dan mekanisme evaluasi berkala, sebagaimana terlihat dalam hasil wawancara dan observasi tentang pembagian tugas guru dan rapat monitoring, yang memperlihatkan kesesuaian dengan prinsip implementasi kebijakan yang membutuhkan prosedur operasional yang baku dan terarah.

Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi jalannya pelaksanaan program. Hambatan utama yang muncul adalah keterbatasan waktu dan beban kerja guru pendamping yang harus menyeimbangkan antara kegiatan pembelajaran reguler dan pelaksanaan proyek P5. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa benturan jadwal antara kegiatan proyek dan agenda akademik seperti tugas mengajar mata pelajaran yang diampu membuat pelaksana harus menyesuaikan strategi pelaksanaan dengan cepat. Hambatan ini menunjukkan bahwa sumber daya non fisik berupa waktu dan tenaga menjadi tantangan implementasi, sebagaimana dikemukakan Edward III dalam variabel sumber daya. Selain itu, beberapa guru menyampaikan bahwa informasi teknis

seperti perubahan jadwal sering diberitahukan secara mendadak sehingga pelaksana membutuhkan adaptasi cepat untuk menyesuaikan rencana kegiatan. Kondisi tersebut terikat bersamaan dengan variabel komunikasi dalam teori yang telah dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa ketepatan dan konsistensi informasi merupakan faktor penting. Hambatan lain yang muncul adalah keterbatasan sarana tertentu dalam pelaksanaan proyek, misalnya kebutuhan bahan atau peralatan yang tidak tersedia di sekolah sehingga siswa harus mengupayakan secara mandiri. Observasi juga menunjukkan adanya variasi motivasi siswa pada tahap akhir proyek saat durasi kegiatan berlangsung panjang, sehingga diperlukan strategi pendampingan untuk menjaga stabilitas antusiasme siswa. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan P5 memerlukan manajemen pelaksanaan yang lebih stabil dan dukungan strategi motivasional yang konsisten.

Secara keseluruhan, faktor pendukung dalam pelaksanaan P5 di SMAN 2 Banguntapan lebih dominan dibandingkan hambatan teknis yang muncul, sehingga program tetap dapat berjalan efektif dan berdampak positif terhadap pembentukan karakter siswa. Temuan penelitian ini

memperkuat teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Bab II bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kesiapan pelaksana, kecukupan sumber daya, efektivitas komunikasi, dan struktur organisasi yang tertata.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini dapat mendukung teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang tercantum dalam Bab II yang menyatakan bahwa kesiapan pelaksanaan, efektivitas komunikasi, struktur organisasi yang tertata, serta kecukupan sumber daya sangat menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hambatan yang muncul bersifat teknis dan dapat disempurnakan melalui penataan jadwal, penguatan koordinasi, dan optimalisasi pembagian beban kerja. Dengan demikian, implementasi P5 di SMAN 2 Banguntapan menjadi bukti bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter tidak hanya memerlukan instruksi normatif, tetapi juga sistem pelaksanaan yang adaptif dan kolaboratif sesuai prinsip Kurikulum Merdeka dan tujuan Profil Pelajar Pancasila.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pelaksanaan P5 sebagai implementasi kebijakan pendidikan karakter di SMAN 2 Banguntapan menurut teori implementasi kebijakan Edward III masih ada kendala meskipun sudah berjalan dengan baik. Dalam aspek komunikasi, sekolah telah menerapkan strategi penyebaran informasi yang beragam dan konsisten melalui jalur formal maupun informal sehingga tercipta pemahaman pelaksanaan dapat bekerja dengan arah yang sama. Namun, terdapat pemberitahuan perubahan teknis bersifat mendadak sehingga guru memerlukan improvisasi di lapangan. Dari aspek sumber daya yang dimiliki oleh sekolah cukup menunjang keberlangsungan kegiatan dan menjadi kekuatan utama. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten dan memiliki komitmen tinggi, fasilitas sekolah yang memadai, serta dukungan pendanaan melalui BOS kinerja. Terdapat juga sumber daya non fisik seperti jadwal mingguan meskipun terkadang harus disesuaikan dengan agenda sekolah. Kepala sekolah, guru pendamping, serta siswa telah menunjukkan komitmen terhadap keterlibatan dalam pelaksanaan implementasi yang menjadi faktor inti keberhasilan program ini. Sedangkan untuk aspek struktur birokrasi menunjukkan bahwa

sekolah telah memiliki sistem tata kelola program yang jelas dan struktur birokrasi yang tertata sehingga membuat implementasi berjalan tanpa hambatan administratif yang berarti.

Faktor pendukung pelaksanaan P5 di SMAN 2 Banguntapan meliputi dukungan kuat dari pimpinan sekolah, sikap positif guru dan siswa, komunikasi yang efektif, serta ketersediaan sumber daya yang relatif memadai. Sedangkan faktor penghambat yang muncul bersifat teknis yang dapat diatasi melalui kerja sama, fleksibilitas pengorganisasian, dan kreativitas tenaga pendidik dalam memfasilitasi kegiatan. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa implementasi P5 di SMAN 2 Banguntapan berhasil terlaksana secara efektif, berjalan terarah, serta memberikan kontribusi nyata guna membangun karakter yang dimiliki oleh siswa yang sesuai nilai-nilai Pancasila.

Saran

1. Bagi Sekolah

Perlu ditingkatkan terkait manajemen waktu dan perencanaan jadwal P5 agar tidak berbenturan dengan kegiatan lain. Fasilitas untuk P5 juga perlu diperkuat terutama pada tema-tema yang membutuhkan alat khusus. Selain itu, diperlukan dukungan lebih berupa

pelatihan dan pembagian tugas yang proporsional untuk mengurangi beban kerja guru pendamping.

2. Bagi Guru Pendamping

Guru pendamping perlu untuk mengembangkan strategi pembelajaran dan motivasi siswa terutama pada fase akhir proyek agar partisipan tetap tinggi serta memperkuat kreativitas dan keterampilan kerja sama sebagai bagian penting dari pendidikan karakter

3. Bagi Peserta Didik

Peserta didik diharapkan lebih meningkatkan rasa tanggung jawab, partisipasi aktif, dan motivasi internal dalam mengikuti setiap tahap proyek. Peserta didik juga perlu mengembangkan kreativitas serta keterampilan kerja sama sebagai bagian penting dari pendidikan karakter

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas subjek penelitian serta menambahkan instrumen pengukuran perkembangan karakter siswa sehingga hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Selain itu, kajian penelitian selanjutnya dapat membandingkan implementasi P5 antar sekolah untuk melihat variasi strategi dan hasil yang dicapai

5. Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga merekomendasikan adanya penguatan kebijakan pada tingkat pemerintah daerah maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan perlu memperkuat sistem pendampingan dan monitoring implementasi P5 di sekolah, khususnya dalam memastikan penyampaian informasi teknis yang lebih konsisten, terstruktur, dan tidak berubah secara mendadak. Sementara itu, kementerian perlu menyusun pedoman pelaksanaan P5 yang lebih operasional dan adaptif terhadap kondisi sekolah, termasuk memberikan fleksibilitas pengaturan waktu pelaksanaan proyek agar tidak berbenturan dengan beban akademik siswa. Selain itu, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan juga perlu diperkuat, mengingat keberhasilan implementasi P5 dalam penelitian ini sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kesiapan guru sebagai pelaksana utama kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, H. Y. et al. (2025). Strategi Manajemen Kesiswaan dalam Mengatasi Degradasi Moral Melalui Program Pembinaan Siswa. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 8(1), 112-130.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Efendy, T. (2023). Konsep Sistem Among Dalam Pendidikan Menurut Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6). 1231-1242.
- Fathurrahman, F. (2020). Hakikat Nilai Hormat dan Tanggung Jawab Perspektif Thomas Lickona & Perspektif Islam (Sebuah Pendekatan Integratif-Introkonektif). *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2). 181-203.
- Hendarman, H et al. (2018). *Konsep dan Pedoman Penguat Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Imania, A & Suprayitno, S. (2024). Analisis Penerapan P5(Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) Tema Kewirausahaan Pada Kurikulum Merdeka Kelas IV SD Islam Darussalam Kedungrejo Bojonegoro. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 12(2), 14-28
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mintawati, H. et al. (2023). Sosialisasi Degradasi Moral Generasi Muda di SMAN 4 Kota Sukabumi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 532-542.
- Pramesti, A et al.. (2024). Implementasi Kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 1(3), 1-8.
- Rahmalia, R et al. (2023). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Metode Blended Learning Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan IPS*, 6(2). 252-256.
- Suwartini, S. (2018). Pendidikan Karakter dan Karakter dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Keberlanjutan. *Jurnal Pendidikan Ke-Sd-an*, 4(1). 220-2342.
- Wahab, A.A & Sapriya, S. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CVA lfabeta
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7(1). 2896-2910.
- Zein, N. H & Siregar, M. F. Z. (2024). Faktor-Faktor Kenakalan Remaja pada Remaja Usia 13-15 Tahun. *Jurnal of Education Research and Humaniora (JERH)*, 9(8), 32-42